

# **SINERGITAS NEGARA DAN PENDIDIKAN ISLAM** **(Realasi dan peran kekuasaan Negara terhadap eksistensi pendidikan Islam di Indonesia)**

Sahibuddin  
FAI - UIM Pamekasan  
Email: sahibuddin@yahoo.co.id

## **Abstract**

*In the world of Islamic history has illustrated that the actual condition of Islamic education, history is not only describes the reality that has occurred in the past, but also serves as a guide for the next generation, so that they are able to make better footing than before. As for the world of Islamic education in Indonesia, has been basically formed along with datangnya Islam in the archipelago, as one of the spread of Islam in this country is one of them through education, as well as through trade and marriage. The role and the pursuit of Islamic education in seizing and uniting the archipelago has become a country that is now called Indonesia of course very much. So therefore, the history of Islamic education during the old order, the new order and even at the time of the order of reforms now needs to be presented again in the exposure history. The State has immense power in organizing and running the government, including in the world of Islamic education, so that, the conditions of Islamic education have accrued over time, and even very different portion of the government which then akhirnya implications of the results of the implementation of the education.*

## **Abstrak**

Dalam dunia sejarah Islam telah tergambar kondisi pendidikan Islam yang sebenarnya, sejarah bukan hanya menggambarkan realitas yang telah terjadi dimasa lalu, melainkan juga berfungsi sebagai pemandu bagi generasi yang selanjutnya, agar mereka mampu untuk menjadikan pijakan yang lebih baik dari sebelumnya. Adapun dunia pendidikan Islam di Indonesia, pada dasarnya telah terbentuk seiring dengan datangnya Agama Islam di bumi nusantara ini, karena salah satu penyebaran Islam di Negeri ini adalah salah satunya melalui dunia pendidikan, disamping melalui jalur perdagangan dan perkawinan. Peran dan kiprah pendidikan Islam dalam merebut dan menyatukan bumi Nusantara ini menjadi suatu Negara yang saat ini bernama Indonesia tentunya sangatlah banyak. Sehingga dengan demikian, sejarah pendidikan Islam pada masa orde lama, orde baru dan bahkan pada masa orde reformasi saat ini perlu untuk dipaparkan kembali dalam paparan sejarahnya. Negara mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan, termasuk juga dalam dunia pendidikan Islam, sehingga, kondisi pendidikan Islam dari masa kemasa mempunyai kedudukan dan bahkan porsi yang sangat berbeda dari pemerintah yang kemudian akhirnya berimplikasi terhadap hasil dari pelaksanaan pendidikan tersebut.

**Kata kunci:** Negara, Pendidikan Islam

## A. Pengantar

Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia, adalah suatu kenyataan yang sudah berlangsung sejak lama, pada masa penjajahan Belanda dan penduduk Jepang, pendidikan Islam diselenggarakan oleh masyarakat dengan mendirikan pesantren, sekolah dan tempat-tempat pendidikan dan latihan yang lainnya. Setelah merdeka, pendidikan Islam dengan ciri khasnya yang berbentuk madrasah dan pesantren mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah Republik di Indonesia, dari beberapa dekade pemerintahan, seperti orde lama, orde baru hingga orde reformasi.

Pemerintahan pada masa orde lama yang dimaksudkan, adalah rentang waktu 1945 sampai dengan 1965, yang diberi tugas oleh UUD 1945 untuk mengusahakan agar terbentuknya suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat Nasional. Oleh karena itu, pemerintah orde lama, telah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam pada masa itu, pasalnya, pemerintahan memandang bahwa, agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pengembangan suatu Negara, sehingga terdapat beberapa usaha yang dilakukan pengelola Negara yang dalam hal ini adalah pemerintah yang diantaranya adalah dengan memberikan bantuan terhadap lembaga-lembaga pendidikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) 27 Desember 1945.<sup>1</sup>

Hal tersebut diperkuat lagi dengan berbagai kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam Bidang Pendidikan Islam antara lain yaitu:

1. Pada tanggal 17-8-1945 Indonesia merdeka. Tetapi musuh-musuh Indonesia tidak diam saja, bahkan berusaha untuk menjajah kembali. Pada bulan oktober 1945 para ulama di Jawa memproklamasikan perang jihad *fi sabilillah* terhadap Belanda/ Sekutu.
2. Pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuk Departemen Agama, dimana tugasnya mengurus penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan mengurus sekolah Agama, seperti pondok pesantren dan madrasah.

---

<sup>1</sup>Dalam BPKNP tersebut menyebutkan bahwa: "Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, maka dari itu hendaknya, mendapat perhatian dan bantuan nyata tututan dan bantuan material dari pemerintah selaku pengelola Negara.

3. Pada bulan desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat = Sekolah Dasar) sampai kelas VI.<sup>2</sup>

Hal tersebut dilanjutkan pada masa berikutnya, yaitu asa orde baru, masa ini dimulai sejak 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari presiden Soeharto ke presiden Habibie pada 21 Mei 1998. Pada awal masa pemerintahan orde baru ini, kebijakan tentang pendidikan Islam yang dalam hal ini adalah lembaga madrasah, bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan orde lama. Pada tahap ini madrasah belum di pandang sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional, akan tetapi baru bersifat lembaga pendidikan bersifat otonom di bawah pengawasan menteri Agama.

Sehingga pemerintah mengambil beberapa langkah untuk dilakukan, yang salah satunya adalah di keluarkannya kebijakan pemerintah pada tahun 1967 yang berfungsi sebagai respons yang positif terhadap TAP MPRS No. XXVII tahun 1966. Dan pada dekade 1970-an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya, pemerintah kemudian menegaskan kembali tujuan dan cita-cita pendidikan Nasional dengan dikeluarkannya TAP MPR No.II/MPR/1988 dan UU Sistem Pendidikan Nasional, No. 2 tahun 1989.

Hal tersebut kemudian di lanjutkan lagi pada masa reformasi, pada masa ini, pemerintah memberikan peluang yang lebih besar lagi pada lembaga pendidikan Islam, pasalnya, lembaga pendidikan Islam pada masa ini mempunyai peran dan kedudukan yang sama dengan sekolah pada umumnya, hal ini, kemudian diperkuat lagi dengan ditetapkannya undang-undang tentang guru dan dosen pada tahun 2003 yang didalamnya juga telah enangkut pembahasan pendidikan Islam.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pandangan Negara terhadap pendidikan Islam**

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi, yang kekuasaannya meliputi politik, militer, ekonomi, sosial-budaya, hingga pengaturan dan pelaksanaan pendidikan, semua yang menyangkut aktivitas masyarakat dalam suatu Negara tersebut, diatur dan ditetapkan oleh kepala Negara yang berada di

---

<sup>2</sup>Walaupun pada masa tersebut, keadaan keamanan di Indonesia masih belum mantap sehingga SKB Dua Menteri belum dapat berjalan dengan semestinya.

wilayah tersebut.<sup>3</sup> Negara adalah organisasi politik dari kekuasaan politik, sehingga Negara merupakan bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan, dengan cara menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama, termasuk didalamnya adalah unsur pendidikan.

Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung cukup lama, yaitu sejak masuknya Islam ke Indonesia, dan menurut penuturan sejarah, masuknya Islam ke Indonesia, mereka masuk dengan damai, dengan melalui beberapa kultur, seperti perdagangan, perkawinan dan bahkan pendidikan.<sup>4</sup>

Pemaknaan dari pendidikan Islam itu sendiri, adalah kegiatan pengajaran dengan sasaran utamanya adalah untuk memberikan pengetahuan ke-Islaman dan menanamkan sikap hidup beragama kepada peserta didik.<sup>5</sup> Sedangkan pengertian pendidikan Islam itu sendiri, menurut Athiyah Al-Abbasyi berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah bukan hanya mengisi otak anak dengan segala macam ilmu yang belum mereka ketahui, akan tetapi untuk mendidik akhlak dan jiwa mereka, serta menanamkan rasa ke utamaan (*fadilah*), dan membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi dan mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya, ikhlas dan jujur.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri, lembaga pendidikan Islam berkembang dengan berbagai macam ragam, yang diantaranya adalah *Madrasah*,<sup>7</sup> *Pesantren*,<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup>Sjaerhan Basah, *Ilmu Negara (Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan)*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007), 33-38.

<sup>4</sup>Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam system Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 3.

<sup>5</sup>Tim penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Blaipustaka, 2000), 153.

<sup>6</sup>Athiyah al-Abbasyi, *Dasar-dasar pokok pemikiran Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 15.

<sup>7</sup>Madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang penamaannya diambil dari bahasa arab dari kata "*Madrasah*" yang berarti sekolah, menurut Maksun, pelajaran yang diberikan pada madrasah ini merupakan kelanjutan dari yang diajarkan di masjid-masjid yang dikenal dalam bentuk *halaqah* yang kemudian mengalami perkembangan dan membentuk pelembagaan pendidikan Islam secara formal. Lihat Maksun, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999), vii.

<sup>8</sup>Istilah Pondok berasal dari bahasa arab yaitu *funduq* (lihat di Abid Al-Bisri, Munawwir A Fatah, *Kamus Al-Bisri, Indonesia-Arab, Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 564) yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana. Wahjoetomo, (*Pesantren* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 70.) Sedangkan dalam istilah lain dikatakan bahwa pesantren berasal dari kata pe-santri-an, dimana kata *santri* berarti murid dalam Bahasa Jawa. Sedangkan istilah pondok berasal dari Bahasa Arab *funduq* (فندق) yang berarti penginapan. ( Abid-Albisri, Munawwir A Fatah, *Kamus Al-Bisri*, 564.). Pendapat lainnya, pesantren berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an (Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam- dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 26.) dan dapat diartikan tempat santri belajar. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa kata santri berasal dari kata Cantrik bahasa Sansakerta, atau mungkin Jawa yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang

*Dayah, Rangkang, dan Surau* dan lain sebagainya. Beberapa nama lembaga pendidikan tersebut, merupakan numenklatur pendidikan yang dikenal di Negara Indonesia.<sup>9</sup> Terdapat banyak sekali kajian terkait dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut yang dilakukan oleh para kalangan sarjana, dan terlepas dari perspektif yang ditawarkan dalam studi-studi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam merupakan *khazanah* Islam Indonesia, yang masing telah memainkan peranannya, dan mampu untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap pelaksanaan kebijakan Negara, untuk melaksanak tugas pembedakan generasi yang berkualitas baik dan berkarakter, dan semua itu sesuai dengan karakteristik masing-masing lembaga pendidikan Islam tersebut.

Respon positif Negara, terhadap eksistensi lembaga pendidikan Islam, merupakan suatu peluang besar bagi para penyelenggara dan pelaksana lembaga pendidikan Islam, untuk dapat mengembangkan lembaga pendidikan Islam pada arah yang lebih baik, respon positif pemerintah, sebagaimana telah disepakatinya SKB tiga menteri<sup>10</sup> yang tujuannya adalah untuk mensejajarkan

---

kemudian dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut *pawiyatan*, Istilah santri juga ada dalam bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pesantren diartikan sebagai asrama, tempat santri, atau tempat murid-murid belajar mengaji. (Umi Chultsum, Windy Novita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kasiko, 2006), 531.). Sedangkan secara istilah pondok pesantren adalah lembaga pendidikan orang-orang Islam, (Haidar Putra Dauliy, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 27.), dimana para santri biasanya tinggal di pondok (*asrama*) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik yang bersifat tradisional, dan kitab-kitab umum, yang bertujuan untuk menguasai ilmu agama Islam secara detail, serta mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat. Namun pondok pesantren secara definitif tidak dapat diberikan batasan yang tegas, melainkan terkandung fleksibilitas pengertian yang memenuhi ciri-ciri yang memberikan kata pondok berasal dari *funduq* (bahasa Arab) yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat penampungan sederhana dari para pelajar atau para santri yang jauh dari tempat asalnya. Dalam istilah lain dikatakan pesantren berasal dari kata pe-santri-an, yang mana kata ini berasal dari kata *santri* berarti murid dalam bahasa Jawa. Sedangkan menurut Zubaedi, pondok pesantren adalah salah satu model pendidikan yang berbasis masyarakat yang kemudian kita kenal dengan istilah perguruan swasta yang mempunyai kemampuan tinggi dalam berswakarsa, dan swakarya dalam menyelenggarakan suatu program pendidikan, (Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, Kontribusi Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 15.) yang bertujuan untuk membentuk tatanan sosial melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan yang bernuansa Islam.

<sup>9</sup>Keragaman lembaga pendidikan Islam tersebut, terjadi bukan hanya pada tingkatan kurikulum, akan tetapi juga lebih dari yang substansial, seperti kurikulum, referensi rujukan hingga model pembelajaran yang ditetapkan. Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Abad ke-20-pergumulan antara modernisasi dan Identitas*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), x.

<sup>10</sup>SKB 3 menteri tersebut diantaranya adalah menteri Agama, menteri pendidikan dan kebudayaan dan juga menteri dalam Negeri), dalam keputusan tersebut berisi diantaranya adalah (1) Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, (2) lulusan madrasah dapat melanjutkan kesekolah umum setingkat lebih atas, (3) siswa madrasah dapat pindah kesekolah

lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan umum, dengan menawarkan porsi muatan kurikulum masing-masing 70% berisi muatan pelajaran umum, dan porsi 30% berisi muatan pelajaran agama. Walaupun demikian, problematika pengembangan lembaga pendidikan Islam masih cukup menuai beberapa persoalan yang kemudian menuntut pemerintah dan juga pengelola serta pelaksana pendidikan Islam itu sendiri, untuk lebih keras lagi berusaha untuk meminimalisir persoalan yang dihadapi oleh pendidikan Islam, persoalan-persoalan yang muncul dalam pendidikan Islam tersebut diantaranya adalah:

- a. Pemahaman SKB tiga menteri tersebut yang hanya difahami secara simbolik oleh para pelaksana pendidikan Islam, sehingga 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama masih belum terlaksana dengan sepenuhnya,
- b. Banyak para lulusan madrasah yang tidak sesuai dengan yang di canangkan, mereka tidak mempunyai kompetensi yang bagus dalam bidang pelajaran umum dan juga dalam bidang agama, mereka hanya akan menjadi lulusan yang serba tanggung dan tidak menyeluruh.

Melihat persoalan yang demikian tersebut, maka pemerintah menawarkan solusi alternative yang lain, yaitu dengan merumuskan sekolah keagamaan yang kemudian dikenal dengan istilah (MAPK) atau Madrasah Aliyah Program Khusus. Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian yang khusus terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam, hal tersebut di implementasikan pemerintah dalam bentuk pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pendidikan madrasah dalam konteks pendidikan Nasional. Terdapat beberapa hal yang dilakukan pemerintah yang diantaranya adalah dengan menyatakan:

- a. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat,
- b. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang stingkat lebih atas,
- c. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.<sup>11</sup>

---

umum yang setingkat. Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 176.

<sup>11</sup>Peraturan tersebut, tertuang dalam undang-undang pendidikan pada bab II pasa 2 tahun 1975M, lihat di Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, 176.

## **2. Pendidikan Islam dari masa ke masa**

### **a. Pendidikan Islam pada masa orde lama**

Pendidikan Islam pada masa orde lama ini, jika merujuk kepada sejarah, maka secara umum masih dapat dikatakan bahwa, keadaan pendidikan Islam masih belum mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah, dan pemerintah kurang sungguh-sungguh dari pemerintah, hal tersebut tentunya disebabkan dominasi pergolakan politik antara pemerintah sebagai pengatur dan pelaksana Negara dengan elit Islam, sehingga menimbulkan saling kecurigaan antara pemerintah dengan elit Islam yang kemudian menyebabkan pemerintah merasa setengah hati untuk mengurusnya.

Namun berkat usaha para elit muslim yang berpandangan progresif, modern dan nasionalis, terutama oleh masyarakat muslim yang telah tersentuh oleh pendidikan dari Negara yang lebih maju, maka mereka melakukan komunikasi sehingga akhirnya visi, misi dan tujuan pendidikan Islam menjadi selaras dengan kebutuhan pemerintah, maka akhirnya pemerintah membentuk lembaga pemerintah yang mengurus bidang ke Agamaan dan pendidikan Agama beserta beberapa peraturan pemerintah terkait dengan hal tersebut.<sup>12</sup>

### **b. Pendidikan Islam pada masa orde baru**

Eksistensi pendidikan Islam pada masa orde baru ini, pada dasarnya, seluruh kebijakan yang terlahir pada zaman orde baru, termasuk didalamnya kebijakan di bidang pendidikan, diarahkan untuk menopang kebijakan pembangunan dan stabilitas ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun pada kenyataannya, pendidikan Islam pada masa orde baru ini, sedikit demi sedikit, eksistensi lembaga pendidikan Islam mulai mendapatkan porsi yang lebih serius dari pemerintah.

Hal tersebut terlihat dari lahirnya SKB 3 menteri tersebut, sehingga antara lulusan pendidikan Islam dan lulusan lembaga pendidikan umum mempunyai hak yang sama. Kemudian yang kedua bias dilihat dari terjadinya pembaharuan lembaga pendidikan Islam, yang dalam hal ini adalah madrasah dan pesantren dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah

---

<sup>12</sup>Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), 321

adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan Islam nonformal dan lain sebagainya.

**c. Pendidikan islam pada masa orde reformasi**

Keadaan lembaga pendidikan Islam pada masa orde reformasi ini, menjadi lebih baik dari masa-masa sebelumnya, yaitu masa orde lama, masa dan masa orde baru, karena hal tersebut dapat terlihat dari beberapa hal yang diantaranya adalah:

1. Kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari system pendidikan nasional,
2. Kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam.
3. Program wajib belajar Sembilan tahun,
4. Penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional,
5. Adanya kebijakan sertifikasi guru dan dosen yang berlaku kepada semua pelaksana pendidikan, baik negeri maupun swasta dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

**3. Kondisi Objektif Pendidikan Islam dan Masa depannya di Indonesia**

Prkatek pendidikan Islam di Indonesia ini sebagaimana digambarkan dalam antaran makalah ini, mereka mengalami pasang surut dari waktu ke waktu, dari masa pemerintahan orde lama, kemudian dilanjutkan pada periode masa orde baru, dan bahkan pada masa orde reformasi yang terjadi di akhir-akhir ini. Namun demikian, dalam perkembangan terakhir, relaitas lembaga pendidikan Islam menunjukkan kondisi wajah yang berbeda dari kondisi yang sebelumnya, salah satu indikatornya adalah jika dilihat dari sisi kuantitasnya yang semakin tahun, semakin mengalami penambahan jumlah kuantitas lembaga pendidikan Islam di Indonesia ini.

Hal tersebut, ditambah lagi dengan ditambahkannya mata pelajaran agama pada jenjang lembaga pendidikan umum, bahkan bukan hanya itu, terdapat beberapa lembaga pendidikan umum yang mencanangkan dan memprogramkan pelaksanaan pondok kilat yang tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan lagi pelaksanaan dan pemahaman para siswa terhadap pendidikan Islam, strategi yang lain adalah dilaksanakannya penyempurnaan kurikulum pendidikan Agama secara terus menerus yang dilakukan oleh lembaga

---

<sup>13</sup>Abuddin Nata, *Sejaran Pendidikan Islam*, 352-355.

pendidikan umum, sehingga pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah umum lebih proporsional dan fungsional.<sup>14</sup>

Berpijak dari kondisi yang demikian, maka masa pendidikan Islam di Indonesia tersebut ditentukan oleh dua factor, yang diantaranya adalah factor Internal dan factor eksternal lembaga pendidikan Islam itu sendiri, selain itu, isu demokratisasi lembaga pendidikan Islam juga dapat mempengaruhi masa depan pendidikan Islam di Indonesia, sehingga dengan demikian, Negara yang dalam hal ini adalah pemerintah, mempunyai andil yang cukup kuat, bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam, agar mereka dapat memerankan perannya di dalam kancah Negara.

#### **4. Eksistensi Pendidikan Islam Sebagai Modal Pembangunan Nasional**

Secara historis, eksistensi lembaga pendidikan Islam yang dalam hal ini adalah pesantren dan madrasah, hampir bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Alasannya sangat sederhana. Islam, sebagai agama dakwah yang disebarkan secara efektif melalui proses transformasi ilmu dari para ulama kepada para masyarakat (*tarbiyah wa ta'lim*, atau *ta'dib*), dalam konteks ke Indonesiaan maka tentu proses ini berlangsung melalui lembaga pendidikan pesantren.

Secara bahasa, pesantren tidak sepenuhnya merujuk pada kata dalam bahasa Arab. Sebutan untuk pelajar yang mencari ilmu, bukan *murid* seperti dalam tradisi sufi, *thalib* atau *tilmidh* seperti dalam bahasa Arab, akan tetapi santri yang berasal dari bahasa Sanskerta. *San* berarti orang baik, dan *tra* berarti yang suka menolong. Dan lembaga tempat belajar itu pun kemudian mengikuti akar kata santri dan menjadi pe-santri-an atau “pesantren”.

Jadi, ada empat ciri utama dalam pesantren pesantren tersebut. yang *Pertama*, pondok harus berbentuk asrama. *Kedua*, kiai sebagai sentral figur yang berfungsi sebagai guru, pendidik, dan pembimbing. *Ketiga*, masjid sebagai pusat kegiatan. Dan *keempat*, materi yang diajarkan tidak terbatas kepada kitab kuning saja. Menurut Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, Penulis Peneliti di *Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization* (INSIST), dengan catur-pusat inilah, pendidikan pesantren berfungsi sebagai “*melting*

---

<sup>14</sup>Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001), 12.

*pot'*, yaitu tempat untuk mengolah potensi-potensi dalam diri santri agar dapat berproses menjadi manusia seutuhnya (*insan kamil*).

Dengan demikian, karakter pendidikan pesantren bersifat holistik. Artinya, seluruh potensi pikir dan zikir, rasa dan karsa, jiwa dan raga dikembangkan melalui berbagai media pendidikan yang terbentuk dalam suatu komunitas yang sengaja didesain secara integral untuk tujuan pendidikan. Di tengah gencarnya kampanye pendidikan berkarakter, pesantren justru sejak dari awal sudah menerapkannya. Tujuan pendidikan pesantren seperti halnya tujuan kehidupan manusia di dunia ini, yang diantaranya adalah, Santri tidak hanya disiapkan untuk mengejar kehidupan dunia, akan tetapi juga mempersiapkan kehidupan di akhirat.

Di sisi yang lain, saat ini sedang banyak dikembangkan sekolah-sekolah yang diberi label Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Akan tetapi jika kita melihatnya lebih dekat, sekolah-sekolah dengan label internasional tersebut hanyalah sekolah yang bertarif mahal (internasional), dan bukan sekolah yang berbahasa Inggris. Sekolah berstandar internasional yang sedang dirintis pemerintah juga dievaluasi dengan ujian nasional.

Jika Anda ingin melihat sekolah berstandar internasional, eksistensi Pondok Modern Gontor adalah salah satu bukti konkretnya. Tidak hanya santri wajib berbahasa Arab dan Inggris, Gontor juga mampu menarik siswa dari luar Negeri, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Brunai Darussalam, Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan berbagai Negara lainnya. Inilah sekolah bertaraf internasional, walaupun tanpa label sekolah internasional.

Bahkan, jauh sebelum Indonesia merdeka, dan jauh sebelum sistem pendidikannya mapan, pesantren dan para alumni-alumninya telah banyak berperan baik di nusantara, maupun kancah dunia. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-19, tercatat nama-nama sekaliber Nuruddin Ar-Raniri, Hamzah al-Fansuri, Abdul Rauf al-Sinkili, Syekh Yusuf al-Makassari, Abdussamad al-Falimbani, Khatib Minangkabawi, Nawawi al-Bantani, Muhammad Arsyad al-Banjari, dan lain-lain. Sosok-sosok alumni pesantren dan Timur-Tengah ini telah melahirkan karya-karya besar di bidang fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Citra intelektual dan ekspansi karya sosok-sosok ini bukan hanya sebatas taraf domestik nusantara, tapi juga sampai diakui di kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Contoh kongkrit tersebut, hanyalah segelintir tokoh pelaksana lembaga pendidikan Islam, sehingga dengan demikian, kehadiran dan eksistensi lembaga pendidikan Islam tersebut adalah modal yang dapat dijadikan bahan bagi pelaksanaan dan pengembangan lembaga Negera yang bertugas untuk mencetak kader bangsa yang lebih baik dan lebih berkualitas, sehingga dengan demikian, Negara menjadi lebih baik.

### **C. Penutup**

Sejarah Islam yang sudah berjalan lebih dari lima belas abad lamanya telah memberikan kontribusi dan meninggalkan napak tilas kesejarahan yang mampu dijadikan potret wajah kondisi pendidikan Islam yang sebenarnya, sejarah bukan hanya menggambarkan realitas kenyataan yang telah terjadi dimasa yang sebelumnya, melainkan juga berfungsi sebagai pemandu bagi generasi yang selanjutnya, agar mereka mampu untuk menjadikan pijakan yang lebih baik dari sebelumnya.

Pendidikan islam di Indonesia, pada dasarnya telah terbentuk seiring dengan datangnya Agama Islam di bumi nusantara ini, karena salah satu penyebaran Islam di negeri ini adalah salah satunya melalui dunia pendidikan, disamping melalui jalur perdagangan dan perkawinan dengan para putri penguasa atau para raja. Peran dan kiprah pendidikan Islam dalam merebut dan menyatukan bumi nusantara ini menjadi suatu Negara yang saat ini bernama Indonesia tentunya sangatlah banyak. Tidak hanya sampaidisitu, kiprah pendidikan Islam dalam mengisi kemerdekaan ini juga masih tetap enunjukkan peranannya.

Sehingga dengan demikian, dalam makalah ini, penulis sedikit menyingkap tabir sejarah pendidikan Islam pada masa orde lama, orde baru dan bahkan pada masa orde reformasi saat ini. Negara mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan, termasuk juga dalam dunia pendidikan Islam, sehingga, kondisi pendidikan Islam dari masa kemasa mempunyai kedudukan dan bahkan porsi yang sangat berbeda dari pemerintah yang kemudian akhirnya berimplikasi terhadap hasil dari pelaksanaan pendidikan tersebut.

## Daftar Pustaka

- Abid Al-Bisri, Munawwir A Fatah, *Kamus Al-Bisri, Indonesia-Arab, Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Abad ke-20-pergumulan antara modernisasi dan Identitas*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012.
- Athiyah al-Abbasyi, *Dasar-dasar pokok pemikiran Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam- dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001.
- Maksum, Madrasah, *Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Wacana Ilmu, 1999.
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sjacrhan Basah, *Ilmu Negara -Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*), Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007.
- Tim penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 2000.
- Umi Chultsum, Windy Novita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kasiko, 2006.
- Wahjoetomo, *Pesantren*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, Kontribusi Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.